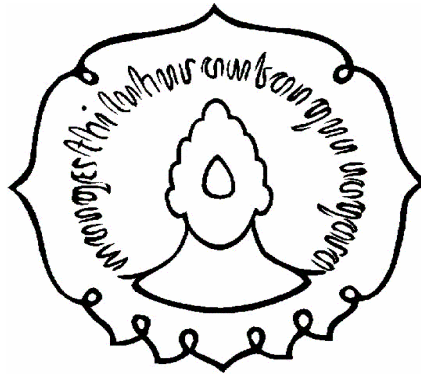


**KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
DI TERMINAL TIRTONADI TERHADAP
PENERIMAAN ASLI DAERAH
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2008**



TUGAS AKHIR

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan**

Oleh:

GATOT PRIYONO

NIM F.3406033

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

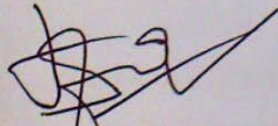
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TERMINAL DI TERMINAL TIRTONADI TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2008** telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program
Diploma III Perpajakan FE UNS.

Surakarta, 15 Juli 2009

Telah disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs. Hanung Triatmoko, MSi., Ak
NIP. 19661028 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi
Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Perpajakan

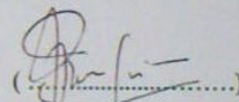
Surakarta, 6 Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Sri Murni, SE, Msi. Ak

NIP. 197103301995122001

Penguji

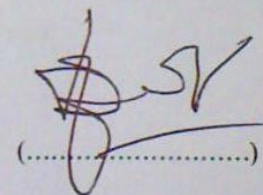


(.....)

2. Drs Hanung Triatmoko, MSi., Ak

NIP. 196610281992031001

Dosen Pembimbing



(.....)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri
ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap
adil ketika kuat (Khalifah Abdul Malik bin Marwan)

Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang (Einstein)

“Ilmu itu bagai bunga, temukan keharumannya dan edarkan pada semua
orang,,,,”
(Pepatah Persia)

Penulis mempersembahkan kepada:

- Bapak dan Mama yang selalu memberi semangat
- Saudaraku yang aku banggakan
- Sahabat dan teman-temanku semuanya
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNYa yang telah di curahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan judul “ **KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI TERMINAL TIRTONADI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2008**”.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data yang diambil dalam penelitian di instansi bersangkutan. Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, MSi, Ak, Selaku ketua Program Diploma III Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE, Msi, Ak, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, Msi, Ak, Selaku Pembimbing Tugas Akhir Yang memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak Sardjono, SH, MM, Selaku Kepala UPTD Terminal yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Suhono, Bsc, Ibu Reni, dan semua staf UPTD Terminal atas bantuannya selama penelitian berlangsung.
8. Bapak dan Mama ku, terima kasih atas doa, perhatian, semangat dan kepercayaannya. Maaf kalau uang di ATM sering habis.
9. Mas-mas ku, yang selalu memberi semangat dan mau direpotkan selama kuliah di Solo,
10. AD 3455 CA dan Laptop ku, yang selalu menemani selama pembuatan Tugas Akhir ini.
11. Demit-demit Kost AN_NUR (Adli, Anggar, Bayu, Bambang, Dono, I-Punk) atas dukungannya dan semangat untuk tidak malas mengerjakan Tugas Akhir.
12. Teman D3 (Depresi Dan Desperate) Aris, Ayox, Andi Gendut, Mamed Unto. Matur suwun kebersamaannya selama ini. Jo lali nek wedangan ngajak-ngajak.
13. Puri P9 (Yogi pulung, sarjo, deni, candra, gancar) terima kasih atas persahabatannya selama ini.
14. Teman-teman ku semuanya yang tidak bisa di sebut satu-satu. Terima kasih telah mau menjadi teman ku dan selalu membantu aku selama kuliah di Solo. Maaf selalu merepotkan.
15. Anak-anak pajak 2006 semua khususnya Kelas A & B, terima kasih atas bantuan dan motivasi selama ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.

Pada akhirnya Karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	1
B. LATAR BELAKANG.....	16
C. RUMUSAN MASALAH.....	18
D. TUJUAN PENELITIAN.....	18
E. MANFAAT PENELITIAN.....	19
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	19

II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA.....	24
--------------------------	----

1. Pengertian Retribusi Daerah.....	24
2. Pengertian Retribusi Terminal.....	29
3. Pengertian Kontribusi.....	30
B. PEMBAHASAN.....	31
1. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah.....	31
2. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	35
3. Perkembangan Penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Terminal.....	39
4. Hambatan-hambatan dalam Pemungutan Retribusi Terminal.....	40
III. TEMUAN	
A. KELEBIHAN.....	42
B. KELEMAHAN.....	42
IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	43
B. REKOMENDASI.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I.1 Data pelataran / landasan untuk bus.....	11
I.2 Jumlah karyawan pengelola terminal.....	12
I.3 Karyawan / Petugas di luar pengelola terminal.....	13
I.4 Himpunan / kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah di terminal.....	13
I.5 Daftar tarif retribusi terminal.....	14
II.1 Realisasi Retribusi Terminal Terhadap Realisasi Retribusi Daerah	31
II.2 Target Retribusi Terminal Terhadap Target Retribusi Daerah	33
II.3 Perbandingan Kontribusi Retribusi Terminal Dari Segi Realisasi Dan Target Penerimaan Terhadap Retribusi Daerah.....	34
II.4 Realisasi Retribusi Terminal Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	36
II.5 Target Retribusi Terminal Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah.....	37
II.6 Perbandingan Kontribusi Realisasi Terminal Dari Segi Realisasi Dan Target Penerimaan Terhadap Pendapatan Asli DAerah.....	38

II.7Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan

Retribusi Terminal Tahun 2005-2008.....39

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

	Halaman
I.1 Struktur organisasi UPTD Terminal.....	10
II.1 Perbandingan Target dan Realisasi	
Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2005-2008.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset/Survey/Penelitian di UPTD Terminal Kota Surakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2002 Tentang Terminal Penumpang.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 2005-2008.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF TERMINAL RETRIBUTION COLLECTION IN TIRTONADI TERMINAL TO THE LOCAL ORIGINAL INCOME IN SURAKARTA CITY DURING 2005-2008 PERIODS

GATOT PRIYONO
F3406033

To secure and prosperous of the public in area. Central government releases Law no 22 the year 1999 about area autonomy, obliges the local government to fund its own local expense. The source of local expenditure is the local income, obtained by optimizing the management of local resources owned by each area. One of *Local Original Incomes (PAD)* to which the government relies on is from the local retribution sector.

One of local retribution types in Surakarta City is *terminal retribution*. The objective of research is to find out the *terminal retribution contribution* in Tirtonadi terminal to the Local Original Income in Surakarta City during 2005-2008 periods and resistance any kind of experienced by during retribution collector.

The analyses used in this study were analysis on the *terminal retribution* during 2005-2008 periods either from the revenue realization or from the revenue target aspect, and comparative analysis on target and realization of advertisement tax revenue during 2005-2008 periods.

The result of research shows that there is still the lack of contribution of terminal retribution to the *Local Original Incomes (PAD)*. Considering the result of research, the writer recommends the government to take some firm measures against the terminal users that do not comply with the regulation, and to socialize the prevailing regulation to the terminal users in order to comply with such terminal regulation.

Keywords: Local Original Income (PAD), Contribution, Terminal Retribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI

a. Sejarah UPTD Terminal Surakarta

Pada awal tahun 1975, Terminal Bus Surakarta, yang padat saat itu bernama “Stasiun Bus Hardjodaksino”, yang berada di Kampung Gemblegan, dipandang tidak mampu lagi menampung jumlah bus yang kian bertambah banyak (*over load*).

Mengingat kondisi yang sudah tidak memadai sehingga timbul kemacetan, serta dari pertimbangan lain, maka Walikotamadya Kepala Tingkat II Surakarta, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 138/Kep/B1/1975 tanggal 26 Juni 1975, yang menetapkan antara lain perlunya relokasi terminal bus dan PT Sarana Dwipa Semarang ditunjuk untuk merencanakan, mengerjakan, sekaligus membiayai proyek Terminal Bus baru yang berlokasi di sebelah Timur **Taman Tirtonadi**, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, yang selanjutnya dinamakan **Terminal Bus Tirtonadi Surakarta**.

Pembangunan terminal tersebut selesai pada bulan Juli 1976. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan mulai dioperasikan pada tanggal 18 Juli 1976. pengelolaannya masih ditangani oleh pihak kontraktor pembangunan yakni PT Sarana Dwipa, yang sesuai perjanjian memiliki hak mengelola selama

80 bulan (8 bulan untuk masa pembangunan, 72 bulan untuk hak pengelolaan).

Setahun kemudian Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor :

$\frac{KM \ 26 \ / \ HK \ .205 \ .Phb \ .77}{271 \ .Tahun \ .1977}$ tanggal 10 Agustus 1977, tentang

Terminal dan Retribusi Angkutan Penumpang. Pada intinya ditetapkan bahwa pengelolaan Terminal Bus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (c.q. Dinas Pendapatan Daerah).

Dengan demikian, pengelolaan Terminal Bus Tirtonadi Surakarta selanjutnya ditangani oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah, dengan Penyelesaian perhitungan dengan pihak PT Sarana Dwipa.

Perkembangan selanjutnya, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah, kemudian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Ditindak lanjuti dengan SK Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Susunan dan Kewenangan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta, dimana UPTD Terminal yang masuk Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya masuk jajaran Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka pengelolaan Terminal ditangani oleh UPTD Terminal Bus Tirtonadi Dinas LLAJ Kota Surakarta, kemudian pada tahun 2009 sesuai dengan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Namun karena sesuai perkembangan jumlah bus, maka di tahun 1988 sudah mendesak untuk diadakan perluasan, saat itu dilakukan pengembangan pertama. Tahun 1991 diadakan perluasan lagi ke arah barat, yang hingga saat ini diperuntukkan bagi bus-bus yang berangkatnya ke arah barat (Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Sumatra). Perluasan tersebut selalu diikuti penambahan fasilitas-fasilitas penunjang terminal, baik kamar mandi maupun parkir kendaraan antar jemput dan sebagainya.

Saat ini Terminal Tirtonadi sebagai salah satu terminal type A di Jawa Tengah mempunyai luas lahan 3,5 ha atau masih belum memenuhi standar kualifikasi terminal type A (min 5 ha). Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surakarta merencanakan pada tahun 2009 diadakan perluasan ke arah barat seluas 1,5 ha. Prosesnya sudah melewati proses DED dan persiapan tanah untuk pondasi.

b. Fungsi dari UPTD Terminal

1. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.

4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
6. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja.
7. Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di lingkungan terminal.
9. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal
10. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, halaman, taman, peralatan dan inventaris milik Pemerintah Kota Surakarta yang berada di kompleks terminal.
11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
12. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
13. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
14. Melaporkan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditentukan oleh kepala dinas

2. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas-tugas menyiapkan surat-menyurat pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan peralatan, penyusunan perencanaan, dan urusan lainnya. Sedangkan fungsi dari Urusan Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan UPTD Terminal serta menyusun laporan.
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- e. Melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris kantor, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya.
- f. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas.

3. Urusan Pungutan

Urusan Pemungutan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan retribusi terminal, membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan retribusi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi terminal. Fungsi dari Urusan Pemungutan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi terminal dan menyiapkan target penerimaan.
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan tunggakan-tunggakan retribusi terminal.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Terminal

4. Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas mengatur dan mengawasi kegiatan lalu lintas di lingkungan terminal, dimana dalam menjalankan tugasnya Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal.
- b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal.
- c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan.

- d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang.
- e. Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang.
- f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal, yakni dengan jarak radius 100 m dari batas wilayah terminal.
- g. Penyidikan pelanggaran.
- h. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran.
- i. Pencatatan dan pelaporan jumlah bus dan penumpang yang datang maupun yang berangkat.
- j. Mengatur tarif angkutan.
- k. Mengawasi kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan.
- l. Mengawasi muatan yang diizinkan.
- m. Mengawasi pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.
- n. Mengawasi terminal serta fasilitas penumpang sesuai peruntukannya.

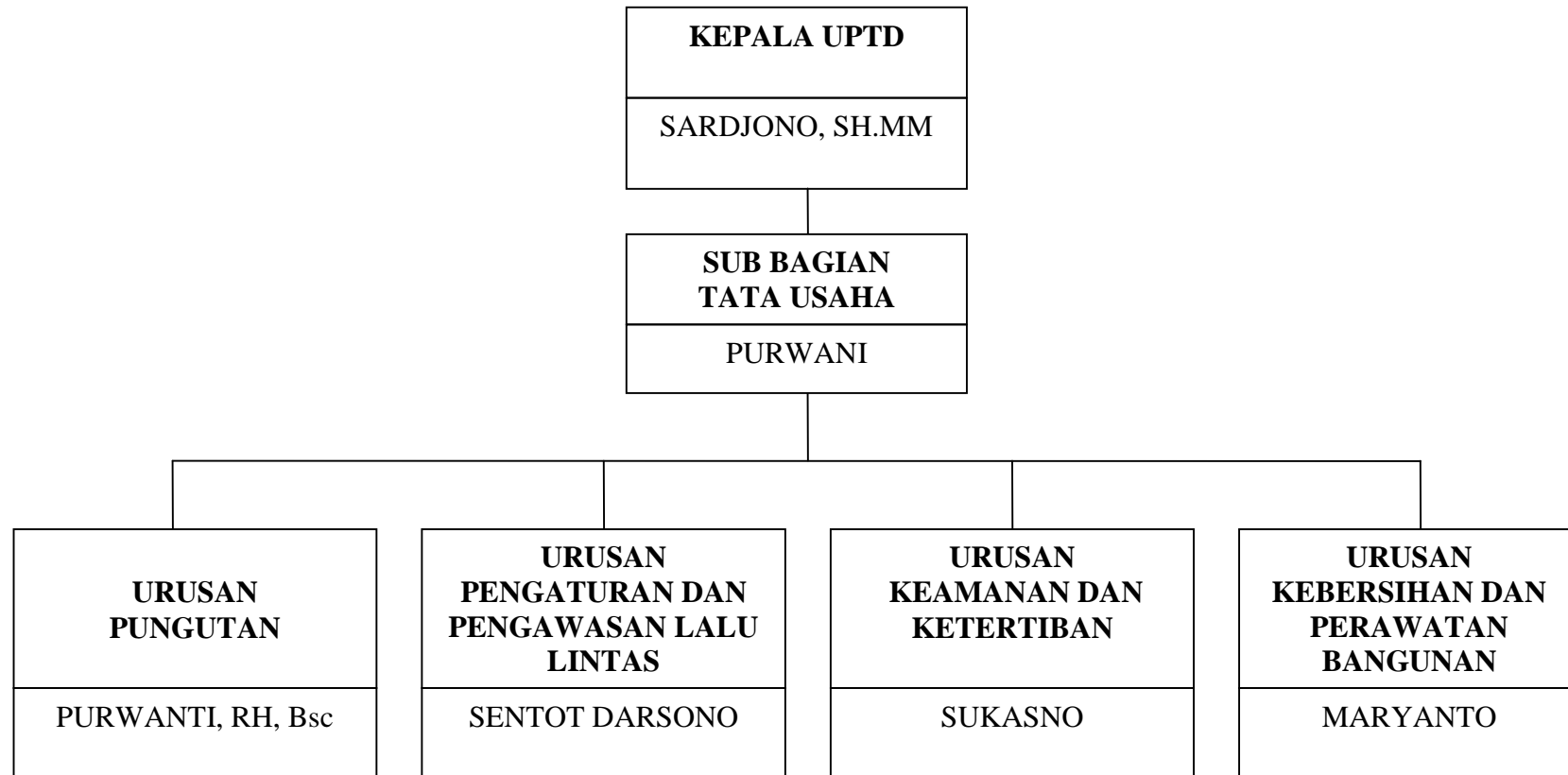
5. Urusan Keamanan dan Ketertiban

Urusan Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penertiban umum dalam kompleks terminal Tirtonadi. Urusan Keamanan dan Ketertiban ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan pimpinan dan karyawan serta harta milik Dinas yang berada di kompleks Terminal Tirtonadi.

- b. Melakukan pembinaan terhadap semua pekerja atau pencari nafkah selain karyawan UPTD Terminal sehingga terjamin ketertiban untuk kelancaran pelayanan umum dalam kompleks Terminal Bus Tirtonadi.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam kompleks terminal Bus Tirtonadi.
 - d. Melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi-instansi dan satuan-satuan lain dalam tugas pengamanan dan penertiban Terminal Tirtonadi.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada UPTD Terminal Tirtonadi.
6. **Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan**
- Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebersihan dan keindahan bangunan gedung, halaman, dan perlengkapannya berikut bangunan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terminal serta memelihara kebersihan, kesehatan, dan keindahannya. Fungsi Urusan Kebersihan dan Perawatan bangunan adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan seluruh bangunan, taman, kebun, dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya.

- b. Melaksanakan kegiatan perbaikan dan perawatan bangunan serta perlengkapannya.
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan semua peralatan kebersihan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Terminal Tirtonadi.



Gambar I.1 Bagan struktur UPTD TERMINAL

Sumber : UPTD TERMINAL KOTA SURAKARTA

d. Monografi Terminal Bus Tirtonadi Surakarta

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 262,
Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, Kode Pos 57134.

1. Data pelataran / landasan untuk bus

TABEL I.1

Data pelataran / landasan untuk bus

No.	Peruntukan	Kapasitas	Luas
1.	Kedatangan bus/ penurunan penumpang	14 bus	2.235 m ²
2.	Pemberangkatan Timur	38 bus	6.420 m ²
3.	Pemberangkatan Barat	28 bus	3.996 m ²
4.	Istirahat Timur	70 bus	6.261 m ²

Sumber : UPTD TERMINAL KOTA SURAKARTA

2. Fasilitas untuk pengunjung / penumpang

Pelataran parkir kendaraan pengunjung 3.400 m²Emplasemen 1.806 m²Ruang Tunggu (2 lokasi) 694 m²Kamar Kecil (8 unit) 262 m²Puskesmas Pembantu (1 bangunan) 64 m²Masjid 153 m²

Tempat pentipan sepeda / motor (2 lokasi)

1.099 m²

Papan Jurusan / papan tarif 70

buah

Papan informasi (dari BIK)	2 m2
Telepon Umum : Telepon coin	5 unit
Telepon Kartu	3 unit
Wartel	18 unit
Kios / los 144 buah	2.981 m2

3. Fasilitas bangunan kantor / pendukung

Kantor ketata usahaan	260 m2
Ruang pertemuan / rapat	60 m2
Ruang urusan pungutan, pelayanan, Gudang arsip	126 m2
Pos penarikan retribusi, ruang Urusan PPL	80 m2
Pos POLRI	12 m2
Ruang Urusan Keamanan Ketertiban	51 m2
Ruang Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan	120 m2
Menara pengawas (2 buah)	180 m2
Garasi truk sampah & kend. Angkutan	243 m

4. Jumlah karyawan pengelola terminal

TABEL I.2

Jumlah karyawan pengelola terminal

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	119 orang

2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	85 orang
	Jumlah	204 orang

Sumber : UPTD TERMINAL KOTA SURAKARTA

5. Karyawan / Petugas di luar pengelola terminal

TABEL I.3

Karyawan / Petugas di luar pengelola terminal

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Petugas Polresta Surakarta	10 orang
2.	Petugas Puskesmas Pembantu	6 orang
	Jumlah	16 orang

Sumber : UPTD TERIMINAL KOTA SURAKARTA

6. Himpunan / kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah di terminal

TABEL I.4

Himpunan / kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah di
terminal

No	Nama Kelompok / Organisasi	Jumlah Anggota
1.	Himpunan Pemilik Kios & Los (HPKL)	125 orang
2.	Himpunan Agen Bus Malam (HABMA)	214 orang
3.	Himpunan Pengurus Bus Antar Kota (HIPBAK)	260 orang
4.	Himpunan Pengemudi Becak Terminal (HPBT)	250 orang
5.	Himpunan Carteran Terminal Tirtonadi	

	(HCTT)	50 orang
6.	Kelompok Pembersih Bus Terminal (KPBT)	28 orang
7.	Kelompok Angkutan Barang Terminal (KABT)	86 orang
8.	Asongan	250 orang
	Jumlah	1.532 orang

Sumber : UPTD TERMINAL KOTA SURAKARTA

7. Daftar Tarif Retribusi Terminal

TABEL I.5

Daftar tarif retribusi terminal

NO	JENIS TPR	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	a. BUS CEPAT AKAP / AKDP	Rp. 2.000,-	1 X Parkir
	b. BUS LAMBAT AKAP / AKDP	Rp. 1.500,-	1 X Parkir
2.	BUS PERKOTAAN		
	a. Bus Besar Bus Sedang	Rp. 750,-	1 X Masuk
	b. Bus Kecil	Rp. 300,-	1 X Masuk
3.	BUS KOTA		
	a. Bus Besar	Rp. 750,-	1 X Masuk

	Bus Sedang		
	b. Bus Kecil	Rp. 300,-	1 X Masuk
4.	Taksi dan mobil	Rp. 500,-	1 X Masuk
			max. 3 jam
5.	Sepeda Motor (Parkir)	Rp. 200,-	1 X Masuk
			Max. 3 jam
6.	Sepeda Motor (Penitipan)	Rp. 500,-	1 X Penitipan
	Termasuk Helm		Max. 24 jam
7.	Sepeda (Penitipan)	Rp. 200,-	1 X Penitipan
			Max. 24 jam
8.	Becak	Rp. 100,-	1 X Masuk
			Max. 24 jam
9.	Kios Terbuka	Rp. 110,-/m2 Perhari	Kelas I
	Kios Tertutup	Rp. 100,-/m2 Perhari	Kelas II
		Rp. 90,-/m2 Perhari	Kios Terbuka
10.	Tempat Penjualan karcis	Rp. 1.500,-/hari	Masa 1 Tahun
	Bus / Non-Bus		
11.	Ruang Tunggu	Rp. 200,-	1 X Masuk
12.	Tanda Pengenal Pedagang, Penjual Karcis, Pembersih Bus, Asongan, dan Penyemir Sepatu	Rp. 5.000,-/orang	Pertahun
13.	Retribusi Asongan dan	Rp. 500,-/orang	Perhari

Penyemir Sepatu		
-----------------	--	--

Sumber : UPTD TERMINAL KOTA SURAKARTA

B. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah melakukan pembangunan segala bidang di seluruh Indonesia. Dalam pembiayaan pembangunan pemerintah melakukan pengumpulan dana dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang berisi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pemerintah pusat sekarang tidak ikut campur tangan dalam merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu unsur yang terdapat dalam APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa sumber PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir, sedangkan retribusi dibagi menjadi 3 golongan antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

Salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terminal. Di Kota Surakarta terdapat salah satu terminal, yaitu Terminal Tirtonadi. Terminal Tirtonadi merupakan terminal tipe A yang ada di Eks-karisidenan Surakarta. Terminal tipe A menurut pasal 2 butir (2) Keputusan Menteri Perhubungan No 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Posisi Kota Surakarta cukup strategis sehingga Terminal Tirtonadi mempunyai jalur keberangkatan ke arah manapun, seperti pemberangkatan bus-bus ke Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Sumatra, Surabaya, dan ke kota-kota se Eks-karisidenan Surakarta. Disamping sebagai urat nadi transportasi darat di kota bengawan dan penunjang perekonomian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di terminal dan sekitarnya.

Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 20 tahun 2001 tentang susunan dan kewenangan dinas lalu lintas angkutan jalan Kota Surakarta, pemungutan retribusi terminal dikelola dalam jajaran Dinas Perhubungan. Selain retribusi terminal, Pungutan daerah yang dikelola dalam jajaran Dinas Perhubungan adalah Retribusi Izin Trayek, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pajak Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota. Pemungutan Retribusi Terminal merupakan penyumbang PAD tertinggi di jajaran Dinas Perhubungan. Dilihat dari total realisasi pungutan

daerah yang dikelola dalam jajaran Dinas Perhubungan pada tahun 2008 masing-masing sebesar : Retribusi Terminal sebesar Rp3.291.679.200,-, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.911.928.700,-, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.030.419.000,-, Pajak Parkir sebesar Rp752.316.260,-, Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota sebesar Rp516.164.500,-, dan Retribusi Izin Trayek sebesar Rp195.089.400,-. Realisasi Retribusi Terminal menyumbang 3,20 % dari total realisasi PAD Kota Surakarta tahun 2008 yang sebesar Rp102.989.919.369,-.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka dalam menyusun tugas akhir penulis mengambil judul **“KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI TERMINAL TIRTONADI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2008”**.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemilihan judul, penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa besarkah kontribusi Retribusi di Terminal Tirtonadi terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota surakarta dari tahun 2005 sampai 2008 ?
2. Adakah faktor-faktor yang menghambat pemungutan Retribusi di Terminal Tirtonadi ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta dari tahun 2005 sampai 2008.
2. Untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungutan Retribusi di Terminal Tirtonadi.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan penulis dapat mengetahui kontribusi retribusi terminal tirtonadi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi UPTD Terminal

Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai salah satu sumber informasi dan bahan masukan dalam peningkatan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Surakarta.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan metode studi kasus yaitu penelitian secara mendalam suatu kasus dan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber pustaka di perpustakaan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah UPTD Terminal Kota Surakarta. Alasan dipilihnya UPTD Terminal Kota Surakarta sebagai objek penelitian, karena penulis mengadakan penelitian di perusahaan tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang bersangkutan dan data historis instansi terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis akan menggunakan tiga cara yaitu pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi pustaka. Adapun ketiga kegiatan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk mengamati semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh UPTD Terminal Kota Surakarta dan semua pihak yang terlibat dalam pemungutan Retribusi Terminal. Kegiatan yang diamati

meliputi aktivitas pendataan rutin, maupun kegiatan yang terjadwal secara tetap dalam waktu penelitian berlangsung. Data-data yang didapat dari pengamatan langsung, selanjutnya dilengkapi dan atau dikonfirmasi kepada nara sumber atau informan.

b. Wawancara

Wawancara dengan para informan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar pelaksanaan wawancara tidak canggung, maka sebelumnya peneliti mengadakan pendekatan dengan terhadap staf-staf UPTD Terminal Kota Surakarta khususnya dalam bidang pemungutan Retribusi Terminal.

c. Studi Pustaka

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data lewat penelaahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi. Referensi diperoleh dari data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku, artikel dan Tugas Akhir sebelumnya yang relevan dan ada kaitanya dengan objek penelitian. Referensi yang diperlukan diperoleh dari beberapa perpustakaan yang ada dilingkungan Surakarta seperti Perpustakaan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Perpustakaan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta
dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

5. Analisis Kontribusi

Perhitungan kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah (Dasril. M, dkk, 2004) dengan rumus sebagai berikut:

$$KRD = \frac{TPAD}{TBRD} \times 100 \%$$

KRD : Kemampuan Rutin Daerah

TPAD : Total Pendapatan Asli Daerah

TBRD : Total Belanja Rutin Daerah

yang kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada, maka:

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100 \%$$

K : Kontribusi

$\sum RT$: Jumlah Retribusi Terminal

$\sum RD$: Jumlah Retribusi Daerah

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum RT}{\sum PAD} \times 100 \%$$

K : Kontribusi

$\sum RT$: Jumlah Retribusi Terminal

Σ PAD : Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Ukuran untuk mengetahui kemampuan Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh Tim Penelitian FISIPOL Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Litbag Depdagri (1991) dalam Dasril m. Dkk, 2004 :

- a. Rasio 0,00% - 10,00% (sangat kurang)
- b. Rasio 10,10% - 20,00% (kurang)
- c. Rasio 20,10% - 30,00% (sedang)
- d. Rasio 30,10% - 40,00% (cukup)
- e. Rasio 40,10% - 50,00% (baik)
- f. Rasio diatas 50,00% (sangat baik)

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Karakteristik retribusi

(<http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan/>) :

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal balik langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di bagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan (Pasal 2 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Dalam Pasal 2 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial (Pasal 3 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan (Pasal 3 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Dalam Pasal 3 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa.
- g. Retribusi Penyedotan Kakus.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 4 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah (Pasal 3 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Dalam Pasal 4 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek.

2. Pengertian Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 mengartikan **Terminal Penumpang** sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh terminal dinamakan **Retribusi Terminal** (Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2002).

Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal (Pasal 31 butir (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2002).

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2002 jasa pelayanan yang ada di terminal terdiri dari :

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.

- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
- d. Jasa penggunaan kios.
- e. Tempat penjualan tiket/karcis.
- f. Ruang tunggu penumpang.
- g. Tanda pengenal : pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus.
- h. Jasa pemasangan reklame.
- i. Jasa kebersihan.

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan yang disediakan di Terminal (Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2002).

Tata cara Pemungutan Retribusi Terminal dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2002 adalah :

- 1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas adalah kontribusi pemungutan retribusi terminal terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dan hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi terminal.

1. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah.

Retribusi terminal merupakan bagian dari retribusi daerah yang ada di Kota Surakarta. Penulis akan menganalisis kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah dari segi realisasi dan target.

a. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Dari Segi Realisasi Penerimaan.

Tabel II.1

Realisasi Retribusi Terminal Terhadap Realisasi Retribusi Daerah

No	Tahun	Realisasi Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Daerah	%
1	2005	Rp3.306.002.860	Rp30.327.843.198	10,90%
2	2006	Rp3.018.570.080	Rp31.738.906.507	9,51%
3	2007	Rp3.085.551.890	Rp33.359.233.949	9,25%
4	2008	Rp3.291.679.200	Rp39.447.439.832	8,34%
Rata-rata				9,50%

Sumber : UPTD Terminal Surakarta

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi retribusi daerah adalah sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K :Kontribusi

RT :Jumlah realisasi Retribusi Terminal

RD :Jumlah realisasi Retribusi Daerah

Dilihat dari rata-rata kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi retribusi daerah di Kota Surakarta antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar 9,50%. Persentase ini merupakan angka yang kecil atau dinilai sangat kurang menurut Tim Penelitian FISIPOL Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan litbag Depdagri (1991) dalam Dasril m. Dkk, 2004.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi terminal mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2005 realisasi retribusi terminal sebesar Rp 3.306.002.860,-. Kemudian tahun 2006 turun menjadi Rp 3.018.570.080,-. Tahun berikutnya yaitu tahun 2007 mengalami kenaikan sejumlah lebih dari 60 Juta Rupiah. Di tahun 2008 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp 3.291.679.200,-.

Antara tahun 2005 ke 2006 retribusi terminal mengalami penurunan penerimaan, namun penurunan tersebut tidak

mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Di tahun tersebut retribusi daerah mengalami kenaikan.

b. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Dari Segi Target Penerimaan.

Tabel di bawah ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah.

Tabel II.2

Target Retribusi Terminal Terhadap Target Retribusi Daerah

No	Tahun	Target Retribusi Terminal	Target Retribusi Daerah	%
1	2005	Rp3.460.000.000	Rp28.652.693.200	12,07%
2	2006	Rp3.460.000.000	Rp32.206.012.000	10,74%
3	2007	Rp3.834.677.000	Rp33.969.651.000	11,29%
4	2008	Rp3.882.677.000	Rp35.575.696.100	10,91%
Rata-rata				11,25%

Sumber : UPTD Terminal Surakarta

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah adalah sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K :Kontribusi

RT :Jumlah target Retribusi Terminal

RD :Jumlah target Retribusi Daerah

Target retribusi terminal tahun 2005 adalah 12,07 % dari target retribusi daerah. Pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 10,74 %. Di tahun 2007 dan 2008 target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah berturut-turut sebesar 11,29 % dan 10,91 %.

Setelah menganalisis kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah dari segi realisasi dan target penerimaan, penulis membandingkan kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan dengan kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan. Perbandingan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.3

Perbandingan Kontribusi Retribusi Terminal Dari Segi Realisasi Dan Target Penerimaan Terhadap Retribusi Daerah

No	Tahun	Kontribusi dari segi Realisasi penerimaan (%)	Kontribusi dari segi Target penerimaan (%)
1	2005	10,90%	12,07%
2	2006	9,51%	10,74%
3	2007	9,25%	11,29%
4	2008	8,34%	10,91%

Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Pada tahun 2005 kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan sebesar 10,90%, sedangkan kontribusi dari segi target penerimaannya adalah 12,07%. Kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan masih kurang sebesar 1,17% dari kontribusi retribusi

terminal dari segi target penerimaan. Di tahun 2006 mengalami penurunan kontribusi retribusi terminal baik dari segi realisasi penerimaan maupun dari target penerimaan menjadi 9,51% untuk realisasi penerimaan dan 10,74% untuk target penerimaan. Tahun berikutnya yaitu tahun 2007, kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan mengalami kenaikan menjadi 11,29%. Tetapi kontribusi dari segi realisasi penerimaan mengalami penurunan menjadi 9,25%. Tahun 2008 kontribusi retribusi terminal dilihat dari segi realisasi dan target penerimaan kembali mengalami penurunan berturut-turut sebesar 8,34% dan 10,91%.

2. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan seberapa besarkah kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dari segi realisasi dan target penerimaan.

a. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari Segi Realisasi Penerimaan.

Tabel II.4
Realisasi Retribusi Terminal Terhadap
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Retribusi Terminal	Realisasi PAD	%
1	2005	Rp3.306.002.860	Rp66.052.438.987	5,00%
2	2006	Rp3.018.570.080	Rp78.585.751.288	3,84%
3	2007	Rp3.085.551.890	Rp89.430.997.982	3,45%
4	2008	Rp3.291.679.200	Rp102.989.919.369	3,20%
Rata-rata				3,87%

Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum PAD} \times 100\%$$

K :Kontribusi

RT :Jumlah realisasi Retribusi Terminal

PAD :Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,87%, persentase kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap PAD masih sangat kurang. Mengingat unsur PAD sangat banyak dan beragam.

b. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari Segi Target Penerimaan.

Tabel II.5
Target Retribusi Terminal Terhadap Target
Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Target Retribusi Terminal	Target PAD	%
1	2005	Rp3.460.000.000	Rp62.602.084.457	5,53%
2	2006	Rp3.460.000.000	Rp74.709.440.000	4,63%
3	2007	Rp3.834.677.000	Rp88.034.379.000	4,36%
4	2008	Rp3.882.677.000	Rp45.781.000.000	8,48%
				5,75%

Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi target retribusi terminal terhadap target pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum PAD} \times 100\%$$

K :Kontribusi

RT :Jumlah target Retribusi Terminal

PAD :Jumlah target Pendapatan Asli Daerah

Tabel II.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2008 kontribusi target retribusi terminal Kota Surakarta terhadap target pendapatan asli daerah Kota Surakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 kontribusi target retribusi Kota Surakarta terhadap target

pendapatan asli daerah adalah sebesar 5,53 %. Untuk tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 4,63 %. Sedangkan di tahun 2007 dan tahun 2008 kontribusi target retribusi terminal terhadap target pendapatan asli daerah sebesar 4,36 % dan 8,48 %. Secara keseluruhan target retribusi terminal berperan sebesar 5,75 % terhadap total target pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Melihat persentase tersebut kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta masih kurang.

Penulis juga melakukan perbandingan atas hasil analisis kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dari segi realisasi dan target penerimaan, seperti halnya perbandingan atas hasil analisis kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah.

Tabel II.6

**Perbandingan Kontribusi Retribusi Terminal Dari Segi Realisasi
Dan Target Penerimaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun	Kontribusi dari segi Realisasi penerimaan (%)	Kontribusi dari segi Target penerimaan (%)
1	2005	5,00%	5,53%
2	2006	3,84%	4,63%
3	2007	3,45%	4,36%
4	2008	3,20%	8,48%

Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Tabel II.6 menunjukkan bahwa di tahun 2005 kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah

mempunyai selisih sebesar 0,53% dari kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan terhadap pendapatan asli daerah. Di tahun 2006, 2007 dan 2008 mengalami penurunan berturut-turut menjadi sebesar 3,84%, 3,45%, dan 3,20%. Sedangkan untuk kontribusi dari segi target penerimaan selama 3 tahun terakhir mengalami pergerakan yang fluktuatif menjadi sebesar 4,63%, 4,36%, 8,48%.

3. Perkembangan Penerimaan Target Dan Realisasi Retribusi Terminal di Kota Surakarta Tahun 2005-2008.

Dalam tabel yang disajikan dibawah ini akan memperlihatkan perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi terminal.

Tabel II.7

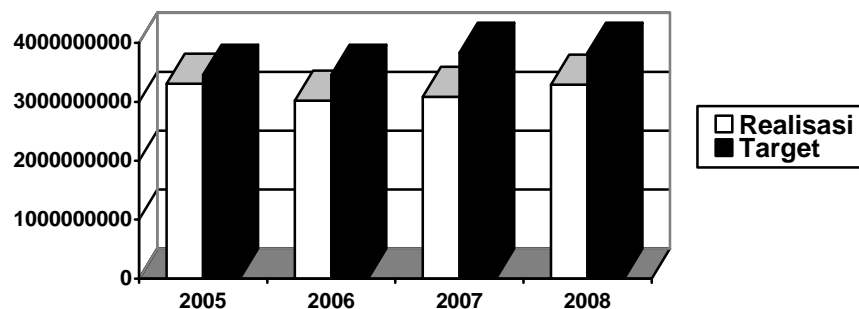
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2005-2008

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2005	Rp3.460.000.000,-	Rp3.306.002.860,-	95,55
2	2006	Rp3.460.000.000,-	Rp3.018.570.080,-	87,24
3	2007	Rp3.834.677.000,-	Rp3.085.551.890,-	80,24
4	2008	Rp3.834.677.000,-	Rp3.291.679.200,-	85,84

Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi terminal juga dapat dideskripsikan dengan gambar seperti di bawah ini.

Gambar II.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan
Retribusi Terminal Tahun 2005-2008



Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta

Gambar di atas menunjukkan perkembangan target dan realisasi dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Dilihat dari perkembangannya, realisasi penerimaan retribusi terminal masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi terminal di Kota Surakarta kurang berjalan dengan baik .

4. Hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi terminal

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal pihak UPTD terminal menemui beberapa hambatan yang mengakibatkan pemungutannya berjalan kurang baik, diantaranya:

- a. Bis yang masuk ke terminal sudah banyak berkurang sehingga berkurang pula penerimaan pungutan retribusi.
- b. Banyaknya kendaraan pribadi sekarang ini.

- c. Cuaca Buruk yang menyebabkan banjir sehingga mengakibatkan bis-bis jarang beroperasi.
- d. Penunggakan pembayaran sewa kios, loket penjualan tiket oleh penyewa.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Retribusi Terminal di lapangan adalah kurang sadarnya pengguna jasa terminal untuk membayar retribusi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD Terminal Kota Surakarta melakukan beberapa langkah dengan cara :

- 1. Mengurangi beban pemakaian listrik dengan cara pemisahan penggunaan listrik untuk penerangan terminal dengan konsumsi listrik untuk kios.
- 2. Menertibkan semua jenis SIP (Surat Izin Penempatan).
- 3. Pendataan ulang penyewa kios, loket penjualan tiket, dan los.
- 4. Melakukan penertiban kepada semua pengguna jasa terminal.

BAB III

TEMUAN

Setelah melakukan pembahasan, maka dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari UPTD Terminal Kota Surakarta sebagai pengelola Terminal Tirtonadi dan pemungut retribusi Terminal.

A. KELEBIHAN

1. Upaya yang dilakukan UPTD Terminal sudah cukup baik dalam meningkatkan penerimaan realisasi Retribusi Terminal terbukti dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan Retribusi Terminal mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target yang ditentukan.

B. KELEMAHAN

1. Pencapaian Realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun 2005 sampai 2008 masih belum memenuhi target.
2. Kontribusi retribusi terminal baik terhadap retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah dari segi realisasi penerimaan dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari analisis dan pembahasan yang dipaparkan di Bab II, dapat disimpulkan pemungutan retribusi terminal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah dinilai masih sangat kurang dalam kontribusinya untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Namun kekurangan tersebut masih wajar mengingat jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan asli daerah sangat beragam.

Pencapaian target yang ditetapkan masih belum memenuhi harapan yang dikehendaki UPTD Terminal Kota Surakarta. Selama 4 tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi terminal di bawah dari target penerimaan retribusi terminal, tetapi 3 tahun belakangan ini realisasi penerimaan retribusi terminal mengalami kenaikan yang berarti.

B. REKOMENDASI

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang bisa meningkatkan kinerja UPTD Terminal Kota Surakarta berdasarkan temuan yang didapat selama penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut adalah :

1. Bertindak tegas terhadap pengguna jasa terminal khususnya penyewa kios, penyewa loket penjualan tiket dan los agar membayar uang sewa tepat pada waktu yang ditentukan.

2. Mensosialisasikan kepada pengguna jasa terminal untuk mematuhi peraturan terminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasril, Munir dkk. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan daerah**. Yogyakarta: YPAPI.
- Departemen Perhubungan. **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Angkutan Jalan**. 1995. Jakarta.
- Guritno, T. 1992. **Kamus Ekonomi**. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Ilyas, B Wirawan. Dan Waluyo. 2003. **Perpajakan Indonesia**. jakarta: salemba empat.
- Kota Surakarta. **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang** . 2002. Surakarta.
- _____. **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Surakarta**. 2005. Surakarta
- Mardiasmo. 2004. **Perpajakan**. Yogyakarta: Andi.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2003. **Pajak dan Retribusi daerah**. Yogyakarta: uii press.
- Republik Indonesia. **Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**. 1999. Jakarta.
- _____. **Undang-undang nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah**. 2001. Jakarta.
- SUSILOWATI ,DESINTA. 2008 ” **KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL BUS TIRTONADI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002-2006**”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasikan.
- www.dishub-surakarta.co.cc
- www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/
- www.scribd.com
- www.wijiraharjo.wordpress.com

YOEL YOSEPH, YULIUS. 2008 ” ANALISIS KEEFEKTIFAN DAN KEEFISIENAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SRAGENTAHUN 2004-2007”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : GATOT PRIYONO
Nomor Induk Mahasiswa : F 3406033
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jurusan/ Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN / DIPLOMA III
Tempat/ Tanggal Lahir : JAKARTA, 23 APRIL 1987
Alamat Rumah : KAMPUNG JEMBATAN RT 12 / 01 NO: 39
 CAKUNG, JAKARTA TIMUR
Judul Tugas Akhir : KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TERMINAL DI TERMINAL TIRTONADI
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
 TAHUN 2005-2008

Pembimbing Tugas Akhir : Drs. Hanung Triatmoko, Msi, Ak

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan/ salinan/ saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa:
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS
* Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan LULUS
* Pencabutan gelar dan penarikan Ijasah kesarjanaan yang telah diperoleh

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surakarta, 17 Juli 2009

Yang Menyatakan



[Signature]

Gatot Priyono



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL
 JL. JENDRAL AHMAD YANI NO. 262 SURAKARTA - 57134 Telp. (0271) 717297, 717759
 Website : www.dishubsurakarta.wordpress.com

SURAT KETERANGAN
 NO : 070 / 919 / 2009

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL KOTA SURAKARTA

menerangkan bahwa :

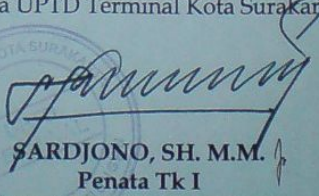
N A M A	:	GATOT PRIYONO
NIM	:	F. 3406033
FAKULTAS	:	EKONOMI
JURUSAN	:	D III , PERPAJAKAN
UNIVERSITAS	:	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Terminal Kota Surakarta , guna melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Tugas akhir dengan judul
 “ KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI TERMINAL TIRTONADI TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2008 ”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar yang berkepentingan maklum dan guna seperlunya.

Surakarta, 16 JULI 2008

Kepala UPTD Terminal Kota Surakarta


SARDJONO, SH. M.M.
 Penata Tk I
 NIP. 19550110 197811 1 001

PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TANGGAL 19 FEBRUARI 2002
TENTANG
TERMINAL PENUMPANG

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 1

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 1



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Nomor 2 Tahun 2002

TENTANG

TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di Terminal.
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan terminal penumpang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Terminal Penumpang.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TERMINAL PENUMPANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta ;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLAJ) adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLAJ) Kota Surakarta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul Jaringan transportasi;
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Sub-Terminal Penumpang adalah Terminal type C sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan kota;
10. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Retribusi Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan penggunaan terminal;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah;
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dari atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;

- h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi,
- j. pos keamanan,
- k. Musholla.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :

- a. kamar kecil/ toilet;
- b. klós/ kantin;
- c. ruang pengobatan;
- d. ruang informasi dan pengaduan;
- e. telepon umum;
- f. tempat penitipan kendaraan;
- g. taman dan penghijauan;

BAB III

DAERAH KEWENANGAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 3

Daerah kewenangan kerja terminal penumpang terdiri dari :

- a. Daerah lingkungan kerja terminal yaitu daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- b. Daerah pengawasan terminal yaitu daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- c. Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pasal ini harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. Rencana umum tata ruang;
- c. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
- d. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antarmoda;
- e. kondisi topografi lokasi terminal;
- f. kelestarian lingkungan.

BAB V

PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pasal ini harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 6

- (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG
DAN JASA PELAYANANNYA

Pasal 7

- Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi bagian-bagian :
 - a. Pengelolaan.
 - b. Pemeliharaan.
 - c. Penertiban Terminal.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Kegiatan perencanaan operasional;
 - b. Kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. Kegiatan dan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan.

- f. penyusunan daftar perjalanan berdasarkan kartu perjalanan;
- g. pengaturan jadwal petugas di terminal;
- h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.

(3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :

- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
- e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
- f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
- h. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.

(4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi pengawasan terhadap

- a. tarif angkutan;
- b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
- c. kapasitas muatan yang diizinkan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
- e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. menjaga ketuhanan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga ketuhanan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;

- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi;
- f. merawat sistim hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 10

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 11

Pungutan jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari :

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;
- d. jasa penggunaan kios ;
- e. tempat penjualan tiket/karcis ;
- f. ruang tunggu penumpang;
- g. tanah pengenal : pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus;
- h. jasa pemasangan reklame;
- i. jasa kebersihan.

BAB VII

PENYELENGGARA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 12

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh UPTD Terminal, di bawah pengelolaan DLAJ.

BAB VIII

PRIZINAN PENGGUNAAN
KIOS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan Izin Penempatan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPTD Terminal.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan Surat Izin Penempatan.
- (4) Di dalam Surat Izin Penempatan, dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang, antara lain
 - a. Kewajiban untuk membayar retribusi dan/atau Pajak Daerah yang ditetapkan, tepat pada waktunya.
 - b. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan.
 - c. Larangan untuk merubah dan atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa seizin Pejabat.
 - d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan tanpa seizin Pejabat.
 - e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia.
 - f. Larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- (5) Disamping Surat Izin Penempatan, kepada para pedagang diberikan Kartu Tanda Pengenal Pedagang, tanpa kecuali karyawan yang bekerja pada pedagang di terminal.

Pasal 14

- (1) Surat Izin Penempatan diberikan untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.

Pasal 15

Pelayanan pemberian Surat Bukti Hak Izin Penempatan pedagang pada kios-kios yang baru, dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai jual kios yang ditetapkan Pemerintah Kota.

Pasal 16

Pedagang Pemegang Surat Izin Penempatan Toko/ Kios/ Rumah Makan di Terminal diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 17

Untuk pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak yang lain selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 18

Keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan izin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang izin diatur oleh Walikota.

BAB IX

TATA TERTIB TERMINAL PENUMPANG

Pasal 19

- (1) Siapapun yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan terminal serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siapapun yang menggunakan fasilitas ruang tunggu penumpang di terminal dan atau sub terminal, dikenakan retribusi Ruang Tunggu.

Pasal 20

- (1) Setiap mobil bus umum yang menjalani trayek tetap dan tera ur maupun trayek insidental dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap mobil bus umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan menakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan layak jalan, persyaratan administrasi dan menaati rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di Terminal.

Pasal 21

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang menjalankan trayek perkotaan dan daerah, baik tetap maupun insidental, dalam rangka pelayanan masyarakat wajib masuk Sub-Terminal yang telah ditetapkan.

- (2) Sub-Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pedagang dilarang mendirikan bangunan baru berupa apapun di Terminal.
- (2) Pedagang yang hendak merubah atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Semua bentuk bangunan yang dirubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Untuk syarat dan ketentuan merubah atau menambah bangunan di dalam terminal selanjutnya akan diatur oleh Walikota.
- (5) Siapapun yang akan mendirikan bangunan baru di lingkungan Terminal harus mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 23

Untuk menjamin kebersihan, kesehatan, dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 24

Semua pedagang dan pekerja di dalam terminal dilarang :

- a. Memindahtangankan Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang/ Karyawan/ Penjual Jasa/ Pembersih Bus/ Penjual karcis dan/ atau Kartu Langganan Retribusi kepada orang lain yang tidak berhak.
- b. Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan.

- c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

Pasal 25

Siapa pun di dalam terminal dilarang :

- a. Bertempat tinggal / menetap;
- b. Merusak, mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris terminal.
- c. Menempatkan kendaraan/ alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/ mengganggu lalu lintas umum.
- d. Menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual oprokan dan berjudi serta minum minuman keras, dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular.
- e. Membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Pasal 26

- (1) Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan :
 - a. Jumlah dibatasi;
 - b. Wilayah operasinya dibatasi;
 - c. Jenis dagangan dibatasi;
 - d. Wajib memakai seragam yang ditentukan;
 - e. Memiliki kartu anggota/tanda pengenal pedagang asongan/penyamir sepatu yang diterbitkan oleh UPTD Terminal;
 - f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di laksanakan oleh Kepala UPTD Terminal.
 - g. Dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 27

Setiap pengusaha angkutan bus umum Antar Kota Antar Provinsi :

- a. harus menempati loket-loket karcis yang ada di terminal.
- b. dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang di luar terminal di dalam daerah pengawasan terminal.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan atau pemindahan hak penggunaan bangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Petugas parkir dan petugas penitipan kendaraan dan atau badan yang mengelola tempat parkir dan penitipan kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan.

BAB X

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan subyek Retribusi
Dan Golongan Retribusi

Pasal 30

Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Terminal dinamakan Retribusi Terminal.

Pasal 31

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi keseluruhan jasa pelayanan sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan yang disediakan di Terminal.

Pasal 33

Retribusi ini digolongkan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, jenis kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya : pengelolaan, penyelenggaraan, kebersihan dan administrasi

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya
Tarip Retribusi

Pasal 36

Struktur tarip retribusi terdiri dari biaya-biaya :
penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan
pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan,
dan pemeliharaan.

Pasal 37

Besarnya tarip retribusi terminal ditentukan sebagaimana
tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Surat Izin Penempatan dapat dipindahtangankan.
- (2) Pelayanan pemberian Surat Izin Penempatan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian pelayanan Balik Nama Surat Izin Penempatan, dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai taksiran yang ditetapkan dengan Walikota.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan
Masa retribusi

Pasal 39

Retribusi dipungut di seluruh wilayah Terminal dan Sub
Terminal.

Pasal 40

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan dan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 41

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 hari kerja.

Pasal 43

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 44

- (1) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administrasi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi selama 3 bulan berturut-turut dan melanggar ketentuan pasal 13,16 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan Izin Penempatan atau Ijin lainnya.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 46

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 47

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali bila wajib pungut retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan, serta tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
- c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut.
- h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 51

Mekanisme pelaksanaan penyidikan dan kewenangan penanganannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

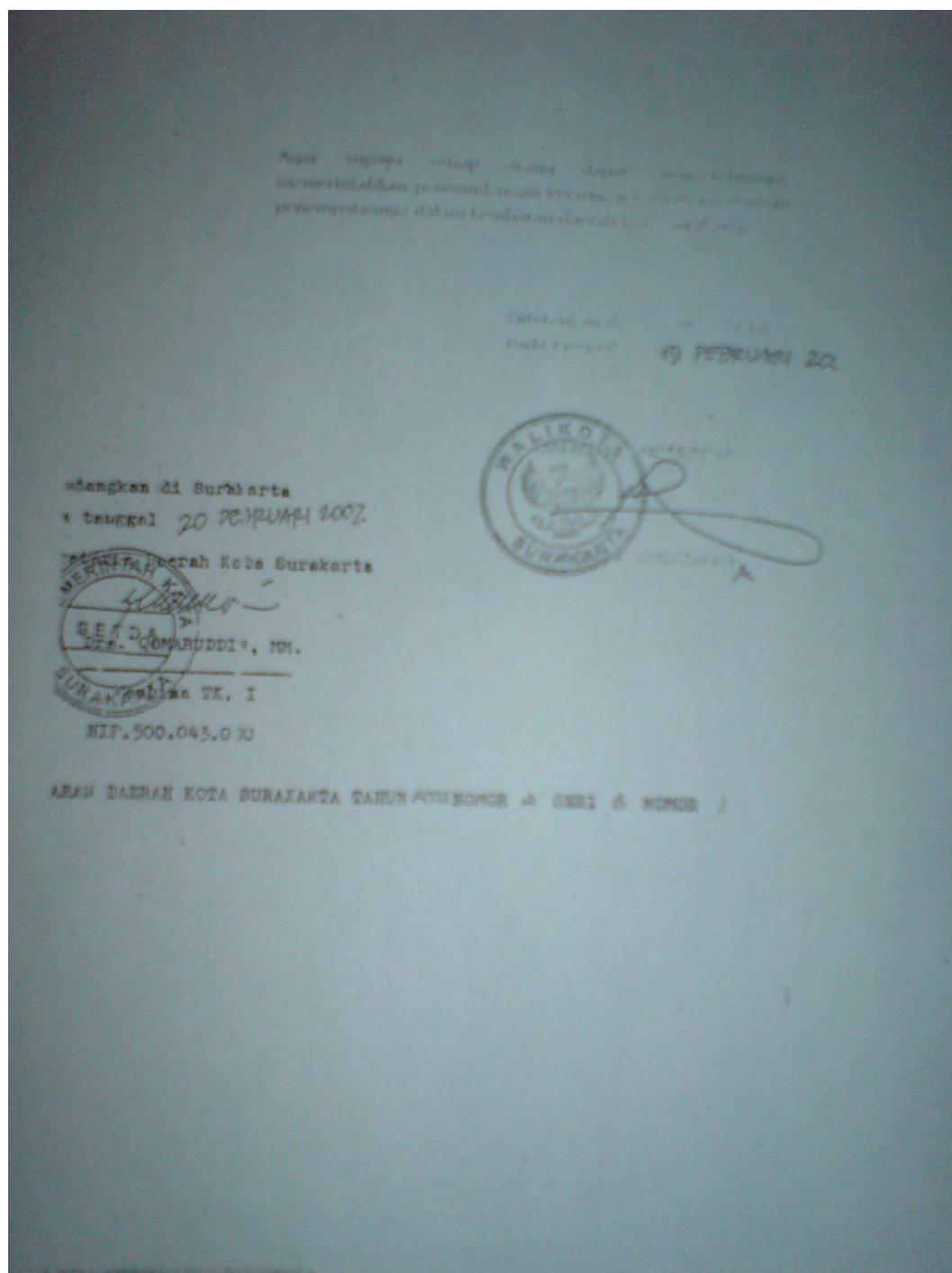
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Terminal Bus, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Terminal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

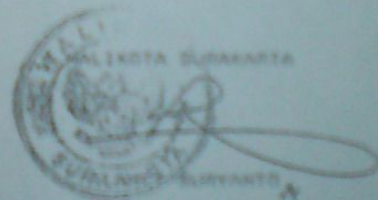


LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota
Surakarta
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS TPR	MACAM RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	a. BUS CEPAT AKAP/AKDP	menurunkan/menaikkan jalur istirahat/parkir kebersihan.	Rp. 2.000,-	1 x parkir
	b. BUS LAMBAT AKAP/AKDP	menurunkan/menaikkan jalur istirahat/parkir kebersihan.	Rp. 1.500,-	1 x parkir
2.	BUS PERKOTAAN			
	a. Bus Besar Bus Sedang	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/parkir kebersihan	Rp. 750,-	1 x masuk
	b. Bus Kec. 1	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat kebersihan	Rp. 300,-	1 x masuk
3.	BUS KOTA			
	a. Bus Besar Bus Sedang	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat kebersihan	Rp. 750,-	1 x masuk
	b. Bus Kecil	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat kebersihan	Rp. 300,-	1 x masuk
4.	Taksi dan Mobil	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/parkir Kebersihan	Rp. 500,-	1 x masuk max. 3 jam
5.	Sepeda Motor	Parkir	Rp. 200,-	1 x masuk max. 3 jam
6.	Sepeda Motor	Penitipan (termasuk helm)	Rp. 500,-	1 x peniti, max. 24 jar
7.	Sepeda	Penitipan	Rp. 200,-	1 x peniti, max. 24 jar
8.	Becak	Masuk Komplek Terminal	Rp. 100,-	1 x masuk max. 24 jar

2	3	4	5
Kios Terbuka	Tempat usaha dagang	Rp. 110,-/m2	Kios I
Kios Tertutup	dan kebersihan	Rp. 100,-/m2	Kios II
		Rp. 90,-/m2	Kios Terbuk
		Perhari	
Tempat Penjualan	Tempat/Loket	Rp. 1.500,-/hari	Kios I tahu
Kardis Bus/	Izin Penggunaan Loket	Rp.	Kios 3 tahu
Non-Bus			
Ruang Tunggu	Ruang Tunggu,	Rp. 200,-	Y w masuk
	kebersihan, penempatan		
	tempat duduk, tempat		
	Informasi, MCK (toilet)		
Tanda		Rp. 5.000,-/org	per tahun
Pengenal			
Pedagang,			
Pengjual Kardis,			
Pembersih Bus,			
Asongan dan			
Penyasi-			
Selesai.			
Retribusi		Rp. 300,-/org	per hari
Asongan dan			
Penyansir			
Selesai.			



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

TERMINAL PENUMPANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka penataan terminal sesuai dengan fungsinya perlu diatur rangkaian kegiatan terminal penumpang yang sebelumnya belum pernah diatur baik dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Terminal Bus maupun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Terminal.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di terminal.

Untuk menunjang peningkatan tersebut dibutuhkan kompensasi dana dengan menambah jenis retribusi dan penyesuaian tarif retribusi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, disamping itu guna lebih terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keamanan arus transportasi di dalam Terminal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf b : Petugas Terminal berwenang mengatur kendaraan yang lalu-lalang di luar Terminal, dalam radius 100 m di luar tembok Terminal, demi kelancaran lalu lintas.

Pasal 3 huruf c s/d Pasal 6 ayat (1)	Cukup Jelas.
Pasal 6 ayat (3)	Badan Hukum yang dimaksud adalah Badan Hukum yang memenuhi kualifikasi jasa konstruksi.
Pasal 10	Daerah yang menjadi wewenang untuk ditertiban petugas Terminal adalah dalam radius 100 m
Pasal 11 huruf f	ruang tunggu adalah termasuk tempat tunggu penumpang dan pengantar.
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPTD Terminal
Pasal 14 s/d Pasal 19	Cukup Jelas.
Pasal 20	Trayek insidental adalah trayek yang diberikan oleh DILAJ dalam hal khusus (Misal Hari Raya).
Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (5)	dikecualikan adalah pendirian bangunan baru dapat dilakukan dalam hal force majeure (misalnya : kebakaran/roboh, karena bencana alam).
Pasal 22 ayat (1)	bangunan baru adalah bangunan yang semula belum pernah ada di lokasi terminal penumpang.
Pasal 22 ayat (2) s/d Pasal 26	cukup jelas

Pasal 3 huruf c s/d Pasal 6 ayat (1)	: Cukup Jelas.
Pasal 6 ayat (2)	: Badan Hukum yang dimaksud adalah Badan Hukum yang memenuhi kualifikasi jasa konstruksi.
Pasal 10	: Daerah yang menjadi wewenang untuk dितertiban petugas Terminal adalah dalam radius 100 m
Pasal 11 huruf f	: ruang tunggu adalah termasuk tempat tunggu penumpang dan pengantar.
Pasal 12	: cukup Jelas
Pasal 13	: Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPTD Terminal
Pasal 14 s/d Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Trayek insidental adalah trayek yang diberikan oleh DIIAJ dalam hal khusus (Misal Hari Raya).
Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (5)	: dikecualikan adalah pendirian bangunan baru dapat dilakukan dalam hal force majeure (misalnya : kebakaran/roboh, karena bencana alam).
Pasal 22 ayat (1)	: bangunan baru adalah bangunan yang semula belum pernah ada di lokasi terminal penumpang.
Pasal 22 ayat (2) s/d Pasal 26	: cukup jelas

Pasal 27 (b)

: dikecualikan dari pasal tersebut apabila di anggar sudah penuh harap lapor ke pengelola terminal.

Pasal 29

: bertanggung jawabnya petugas parkir, penitipan barang dan atau badan pengelola parkir/penitipan adalah setelah dibuktikan di Pengadilan bahwa hilangnya kendaraan dan kelengkapannya dikarenakan kelalaian/kealpaan.

Pasal 30 s/d Pasal 38 ayat (1)

: Cukup Jelas.

Pasal 38 ayat (2)

: Balik Nama SIP dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atas izin Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepala Terminal.

Pasal 39 s/d Pasal 47

: Cukup jelas.

Pasal 48 ayat (1)

: pembebasan retribusi hanya dapat diberikan karena keadaan force majeure.

Pasal 48 ayat (2) s/ d Pasal 54

: Cukup Jelas

Daftar Tarif Asongan Rp.500,-/hari

: Asongan diberi hak Rp.500,- /hr

---000---